

IMPLEMENTASI PROGRAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI DESA SUNGAI RENGAS KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

NISA RAMADHANI ^{1*}

NIM:E1011161030

Hardilina,²,Arifin,²

*Email: e1011161030@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis terkait faktor yang menghambat keberhasilan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang telah dilakukan di Desa Sungai Rengas oleh pemerintah. Permasalahan stunting yang terjadi di daerah desa sungai rengas ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya angka persentase balita stunting atau Gizi buruk di daerah ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis menggunakan teori Cheema dan Rondinelli yang menggambarkan empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain 1). Kondisi lingkungan: Masih kurangnya koordinator di lapangan dalam tahap kerja implementasi, 2). Hubungan antar organisasi: Sudah cukup baik, walaupun tidak banyak aktifitas dalam komunikasi ini, 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program: Masih kurang untuk memenuhi standar kebutuhan dalam implementasi, 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana: Masih kurang dalam memahami dan mempraktikkan secara langsung. Saran penelitian ini yaitu untuk meningkatkan proses percepatan perbaikan gizi terkait akan kondisi lingkungan metode dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada khususnya pada masalah tidak ada pedoman/SOP khusus dan jelas untuk mengarahkan kerja implementor, pemerintah harus membuat SOP khusus untuk program stunting, Program yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya harus sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Stunting.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa yang akan datang. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Jumlah stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita.

Pentingnya topik 1000 hari pertama kehidupan karena banyaknya

permasalahan yang terjadi di setiap kota, kabupaten hingga daerah mengenai stunting yang semakin lama semakin meningkat jumlah balita yang mengalami gizi buruk. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan, peraturan tentang stunting yaitu 1000 hari pertama kehidupan namun masalah stunting belum mampu menurun serta menginjak angka standar stunting sesuai kebijakan yang telah di buat. Program tersebut masih belum maksimal di sejumlah daerah khususnya desa-desa yang jauh dari perkotaan.

Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) dan program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Tujuan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Selain

itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi, meskipun bukan tertinggi di provinsi ini, namun angka stuntingnya tidak tetap dari tahun ke tahun. Masih kurangnya tenaga medis yang ada di puskesmas sungai rengas khususnya tenaga gizi di desa sungai rengas masih belum memiliki tenaga gizi. Sedangkan standar SDM untuk tenaga gizi puskesmas minimal 2 orang. Ahli gizi dalam program 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting dalam pemantauan dan pengukuran jumlah gizi pada ibu hamil dan balita di desa sungai rengas.

Sedangkan SDM pada posyandu daerah desa sungai rengas memiliki tenaga medis yang cukup yaitu 1 posyandu 5 tenaga medis, namun kurang pada kualitasnya dikarenakan SDM

yang bertugas pada posyandu merupakan tenaga medis yang sudah tidak muda dan bukan ahli dibidang gizi sehingga sulitnya memahami dan menerapkan arahan program stunting yang sudah di berikan oleh puskesmas.

Dalam menangani masalah stunting dan menjalankan program stunting ini tentu memerlukan banyak organisasi dan hubungan yang baik dan efektif agar program dapat berjalan dengan baik. Pada kabupaten kubu raya ini hubungan antar organisasi ini sudah baik namun karena pemerintah pusat belum memfokuskan program stunting untuk menyatu maka organisasi memiliki program sendiri-sendiri untuk menangani stunting ini. program sendiri-sendiri. Program kesehatan sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun menjadi penting untuk mengatasi hal tersebut. Dalam jalannya program ini juga masih terbatasnya penguatan kapasitas terkait pengukuran tumbuh kembang anak sehingga alat pengukur masih terbatas. Alat yang lengkap hanya di miliki oleh puskesmas di banding posyandu yang hanya beberapa alat saja, itupun dengan jumlah yang terbatas.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Belum ada SOP terkait pelaksanaan program 1000 HPK
2. Petugas Gizi ahli masih kurang di puskesmas maupun posyandu
3. Terbatasnya alat pengukuran gizi pada balita
4. Kurangnya pemahaman petugas pada Posyandu desa Sungai Rengas.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kecamatan Sungai Rengas.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Mengapa implementasi kebijakan 1000

Hari pertama kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya belum berhasil?”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab implementasi kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas belum berhasil.

6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh, manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, manfaat ini dimaksud sebagai langkah pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori, sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu pemecahan permasalahan secara nyata. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dari penelitian ini akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap efektivitas kerja pegawai.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi

Kantor Imigrasi dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai dan kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas.

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah Carl Friedrich (1969:79) dalam Leo Agustino (2016:7).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan publik. Bagaimanapun juga kebijakan harus

2. Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin (Winarno, 2016: 134) menyatakan bahwa: "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Cheemadan Rondinelli dalam Subarsono (2008:23) menggambar empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain;

(1). Kondisi lingkungan,

Menurut Cheema dan Rondinelli Didalam kondisi lingkungan tercakup berbagai faktor, seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infra struktur politik, di tingkat local, sosial budaya dan berbagai organisasi kepentingan,serta tersedianya sarana dan prasarana fisik.

(2). Hubungan antar organisasi

Mengenai hubungan dengan variabel kedua, menurut Rondinelli (1983: 27) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program memerlukan interaksi dari dan koodrdinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkat pemerintahan(local, regional, dan nasional), serta kerjasama denagn lembaga-lembaga non pemerintahan dikalangan kelompok-kelompok yang berkepentingan

(3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program,

Variabel ketiga, sumber daya organisasi untuk implementasi program dijelaskan sebagai berikut. Kondisi lingkungan yang kondusif

dalam arti dalam arti dapat memberikan direksi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, dan hubungan interorganisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya suatu program. Sampai sejauh mana pemerintah local memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan anggaran, mengalokasikan anggaran untuk mengalokasikan pembiayaan kepada badan/dinas pelaksana, kewenangan untuk memungut sumber-sumber keuangan dan kewenangan untuk membelanjakannya pada tingkat local juga mempengaruhi pelaksanaan seefektif mungkin.

(4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Menurut rodinelli karakteristik dan kemampuan agen pelaksana pada penimplementasian di utamakan dibidang teknik, managerial dan politik, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang

datang dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran sejauh mana gambaran tersebut dilakukan secara apa adanya berdasarkan data dan fakta yang terjadi untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka diperlukan suatu penelusuran informasi yang mendalam, untuk itu diri peneliti menjadi instrument dan kaidah inilah disebut dengan analisis penelitian kualitatif, hasil penelitian ini dipaparkan dengan apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan, hal inilah yang membuat penelitian ini bersifat deskriptif.

Pendapat Bogdan dan Taylor (1975) (dalam Moleong, 2007:4) yang menyatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam hal ini peneliti perlu menganalisa dan mendalami faktor-faktor yang terjadi. Menggambarkan kejadian yang terjadi sedemikian rupa secara sistematis dan mencari informasi tentang informasi penelitian kepada orang yang mengetahui, guna memperoleh suatu pemecahan permasalahan yang baik dan benar, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab ketidak optimalan dari program 1000 hari kehidupan di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sungai Rengas kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan data daftar balita yang mengalami stunting di puskesmas sungai rengas memiliki jumlah balita stunting terbesar yaitu 239 dari jumlah 869 balita di sungai rengas 1 dengan

prevalensi 27,50% di kabupaten Kubu Raya.

2. Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan implementasi kebijakan tentang stunting di kabupaten Kubu Raya dan memiliki sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti baik itu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yakni menentukan sumber informasi untuk tujuan tertentu saja. Yang artinya orang yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan terkait masalah implementasi kebijakan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Kubu Raya adapun subjek penelitian ini yakni:

1. Kepala Seksi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

2. Penanggung Jawab Seksi Gizi Masyarakat Puskesmas Desa Sungai Rengas
3. 2 Staf/Pegawai yang berkaitan
4. 3 masyarakat yang memiliki balita stunting

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal pokok pembicaraan yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Hal ini dilakukan penulis untuk melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan di desa sungai rengas belum optimal.

D. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Guna memperoleh informasi dan data yang relevan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penulisan, maka penulis melakukan wawancara kepada informan yang dinilai memiliki pengetahuan terhadap objek yang akan diteliti. Subjek dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, wawancara menjadi teknik pengumpul data yang sangat penting

guna mendapatkan jawaban yang lebih detail dan mendukung data-data tertulis.

Wawancara dilakukan penulis berdasarkan Teori yang digunakan, yakni menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis, ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dalam suatu program yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Berdasarkan teori tersebut penulis memaparkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I (satu) bahwa tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan di desa Sungai Rengas.. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui, menggambarkan dan menganalisis faktor menyebabkan implementasi program 1000 hari pertama kehidupan di desa Sungai Rengas belum berjalan secara optimal .

Penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan selama ini dan selanjutnya penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan terkait Kebijakan percepatan perbaikan gizi yang di pilih dalam menyelesaikan permasalahan stunting pada balita. Selanjutnya proses tersebut akan dikaji lebih mendalam dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan teori yang telah di paparkan pada Bab II (dua). G. Shabbir Cheema dan Dennis, ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dalam suatu program yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Keempat variabel di atas akan dibahas lebih mendalam pada subbagian pembahasan.

Bahasan tentang Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Tentang Gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi dalam rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas. Berdasarkan dengan kebijakan Perpres Nomor 42 tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan gizi dalam rangka 1000 Hari pertama Kehidupan bahwa untuk melaksanakan tujuan pada Pasal 2 (1) Tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. (2) Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah: a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat; b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Ketentuan diatas menimbulkan kewajiban bagi pemerintah beserta jajaran di bawahnya untuk melaksanakannya dengan melakukan berbagai kebijakan tentang perbaikan gizi dalam rangka 1000 HPK, diantaranya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2019 tentang gerakan

percepatan penurunan stunting kebijakan tersebut terbentuk agar pemerintah kabupaten Kubu Raya dapat lebih fokus dalam mengatasi masalah stunting yang ada di Kabupaten Kubu Raya

2. Pembahasan

a. Kondisi Lingkungan

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, kondisi lingkungan sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan internal dan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang kondusif agar kebijakan yang telah dibuat dapat efektif.

Didalam kondisi lingkungan tercakup berbagai faktor, seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infra struktur

politik, di tingkat local, sosial budaya dan berbagai organisasi kepentingan,serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. Suatu kebijakan pada hakikatnya timbul dari suatu kondisi lingkungan sosial sampai ekonomi dan politik yang khusus dan kompleks.

b. Hubungan Antar Organisasi

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, hubungan antar organisasi sangat menentukan keberhasilan dalam proses implementasi suatu program. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

c. Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, sumber daya merupakan faktor pendukung atas keberhasilan suatu program. Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pengimplementasian program agar dapat berjalan dengan baik. Sumber daya dapat bermacam yaitu sumber daya manusia itu sendiri guna sebagai penunjang atau pelaksana suatu implementasi sesuai atau tidaknya sumber daya manusia yang ada didalamnya tentu sangat berpengaruh pada keberhasilan program maka dari itu sumber daya manusia yang bersangkutan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar suatu program. Hal tersebut juga berlaku pada sumber daya lainnya yaitu sarana prasarana penunjang proses implementasi agar dapat berjalan lancar sesuai yang sudah direncanakan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Oleh karena itu, alat yang digunakan haruslah memenuhi standar kualitas dan kuantitas agar implementor dapat menjalani tugasnya dengan efektif.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Pada proses penerapan menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yakni karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam menuju keberhasilan program dibutuhkan sumber daya dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk dapat melihat ini harus pula di lengkapi dengan karakteristik dan kemampuan implementor dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan hasil yang sudah direncanakan.

Kemampuan implementor dalam teknis program ini harus benar benar memiliki pemahaman yang sesuai karena hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil akhir program kedepannya. pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar

sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan oleh para implementor.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang ada seperti yang telah dijelaskan di Bab I (satu) dan dari hasil penelitian serta uraian pembahasan pada Bab V (lima) dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tentang Program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai rengas Kabupaten Kubu Raya belum optimal. Penulisan yang penulis lakukan dilapangan untuk mendapatkan data-data yang kemudian data tersebut penulis kaji secara mendalam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan G. Shabbir Cheema dan A. Rondinelli dengan empat faktor yaitu

kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumber daya organisasi, Karakteristik dan kemampuan pelaksanaan. Dari keempat faktor tersebut penulis simpulkan dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya belum optimal dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kondisi Lingkungan

Kondisi Lingkungan dalam implementasi kebijakan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya belum optimal terutama dari segi pedoman implementasi di lapangan. Belum adanya pedoman/SOP khusus dalam menjalani langkah-langkah program di lapangan.

B. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik meskipun jarang bekerja sama untuk program dan biasanya hanya komunikasi di lakukan lewat kepala bagian masing- masing dan diarahkan kembali. Dan masing-

masih dilakukan dengan cara sendiri-sendiri sesuai program instansi yang berkaitan. Sedangkan, hubungan yang dijalani dengan kelompok masyarakat yang bersangkutan sudah baik di puskesmas namun tidak untuk kelompok masyarakat di lapangan apalagi yang tidak ke puskesmas.

C. Sumber Daya Organisasi Dalam Proses Implementasi

Sumber Daya Organisasi dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya belum Optimal meskipun sudah ada namun masih terbatas terutama untuk alat penunjang pengukuran dan tenaga ahli gizi.

D. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya belum Optimal dari segi pemahaman masih kurang dikarenakan para implementor yang sudah tidak muda lagi hal tersebut menyebabkan mereka salah dalam pengukuran, sehingga hasil

pengukuran yang dilakukan tidak tepat. Kemungkinan dikaarekan rata rata umur tenaga kesehatan di posyandu sudah cukup namun mereka bukanlah tenaga kesehatan dibidang gizi maka dari itu mereka harus memahami dan di beri penjelasan dari ahli dibidang gizi puskesmas kesehatan tentang teknis penanganan gizi.

2. Saran

Berdasarkan penulisan yang penulis lakukan dan setelah penulis mengambil kesimpulan tentang masalah yang dihadapi terhadap Implementasi Kebijakan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan Pertama tentang Program Percepatan Perbaikan Gizi di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya, Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan proses percepatan perbaikan gizi terkait akan kondisi Lingkungan metode dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada khususnya pada masalah tidak ada pedoman/SOP khusus dan jelas untuk mengarahkan kerja implementor, pemerintah harus membuat SOP khusus untuk

program stunting ini agar implementor dapat menjalankan program sesuai SOP yang ada agar program dapat berjalan sesuai dengan sistematika program hal ini untuk menghindari ketidak efektifan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan agar kualitas pelayanan dan efektifitas kerja berjalan dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Hubungan antar Organisasi yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya harus sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dan berjalan dengan baik. Saran agar kebijakan dan sikap baik tersebut dapat di pertahankan dan menjadi pedoman agar setiap kebijakan yang dibuat dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik khususnya pada kelompok masyarakat yang bersangkutan

ini sebaiknya mendapatkan wawasan dan pengawasan khusus agar mereka paham dan menjalaninya sesuai standar gizi yang tepat.

3. Sumber Daya Organisasi dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya juga harus mencukupi kebutuhan untuk menjalankan program, karena kekurangan sumber daya dapat sangat berpengaruh terhadap keefektifan hasil program.
4. karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya agar ditingkatkan lagi agar lebih baik. Karena menurut penulis kemungkinan masalah kemampuan ini bisa di atasi dengan dilakukannya penambahan wawasan pada implementor secara bertahap sehingga dapat terlatih.

F. REFERENSI

- AG, Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.G Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agustino,Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Widodo, Prabowo.P,Dkk, 2011, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Suntoro Irawan,. Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Solichin, Abdul, Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta

november 2019 (diakses tanggal 25 mei 2018)

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: TRUEN RTH.

Widodo, Prabowo.P,Dkk, 2011, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Winarno, B. 2016. *Kebijakn Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013 Tentang Gernas PPG Dalam Kerangka 1.000 HPK

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi Mulai Dari Awal Hamil Sampai Anak Usia 2 Tahun.

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Gerakan Percepatan Penurunan Stunting.

SUMBER INTERNET

Halo,Kemkes.Data Dasar Puskesmas (<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/data-dasar-puskesmas/20.%20Data%20Dasar%20Puskesmas%20final%20-%20Kalbar.pdf>) Diakses pada 10 agustus 2019

Profil kesehatan Kabupaten Kubu Raya(<http://www.depkes.go.id/profil/6112-Kalbar-Kab-Kubu-Raya-2017>) Diakses pada tanggal 3

